

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ketaatan Hukum

Ketaatan hukum tidak lepas dari kesadaran hukum dan kesadaran hukum harus didahului dengan pemahaman hukum, kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum adalah ketidaktaatan. Ketidaksadaran hukum berawal dari ketidak pahaman seseorang terhadap hukum. Pernyataan tersebut harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari pemahaman dan ketaatan hukum.¹¹ Masyarakat yang dikatakan paham hukum dan sadar hukum apabila mereka mematuhi hukum dengan kesadaran, maksudnya secara rela tanpa adanya paksaan, tekanan dan bukan karena takut dengan adanya sebuah saksi. Berawal dari kesadaran hukum inilah nantinya akan lahir masyarakat yang tertib hukum dan norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dasar-Dasar Ketaatan Hukum

Ketaatan hukum masyarakat terhadap hukum ialah merupakan suatu sikap masyarakat dalam menanggapi suatu aturan baik itu melalui tindakan ataupun ucapan. Jika berbicara tentang ketaatan hukum maka hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum, hal tersebut dikarenakan ketaatan akan muncul ketika kesadaran terhadap hukum telah ada. Proses untuk mendapatkan kesadaran hukum dapat melalui pembelajaran secara formal maupun informal. Lingkungan juga membentuk seseorang dalam

¹¹Kamarudin, “Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement”, *Jurnal Al-‘adl* vol. 9 No.2, Juli 2016. hal. 150.

pembentukan kesadaran terhadap hukum. Ketika seseorang telah menyadari suatu aturan hukum maka tergantung pada orang tersebut apakah dia akan mematuhi hukum tersebut.

Ketaatan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut. Adapun dasar-dasar dari ketaatan hukum sebagai berikut.¹²

- a. *Indoctrination* (penanaman ketaatan secara sengaja) yaitu sebuah peraturan hukum itu menjadi sebuah doktrin yang ditanam secara sengaja kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar penerapan hukum itu merata sampai keseluruhan lapisan masyarakat, sehingga ketaatan hukum yang diinginkan dapat terwujud.
- b. *Habituation* (pembiasaan perilaku) yaitu seseorang akan mematuhi peraturan hukum itu karena rutinitas yang mereka lakukan. Seperti halnya seseorang yang rutin memakai helm pada saat berkendara sepeda motor. Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tersebut dengan alasan mengekang kebebasan. Akan tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

¹² Zainuddin ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar grafika, 2007), hal. 351-352.

c. *Utility* (pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi) yaitu seseorang mematuhi peraturan hukum itu karena dapat memanfaatkan secara substansif dari peraturan itu. Pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamika kaidah.

d. *Group Identification* (mengidentifikasi dalam kelompok tertentu) yaitu seseorang akan mematuhi hukum ketika melihat atau mengacu pada kelompok yang telah melaksanakan. Salah satu sebab mengapa seseorang patuh terhadap kaidah adalah karena ketaatan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok lainnya, akan tetapi karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah-kaidah kelompok lain karena ingin mengadakan karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketaatan hukum

menurut Soerjono Sukanto dalam bukunya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, kepatuhan hukum

masyarakat tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui suatu proses pentahapan, tahap tersebut antara lain:¹³

- a. Tahap prakonvensional, yaitu seseorang mematuhi hukum karena ia memusatkan perhatian pada akibat, apabila ia tidak mematuhi hukum tersebut
- b. Tahap konvensional, yaitu penekanan yang diletakkan pada pengakuan bahwa hukum berisikan aturan permainan dalam pergaulan yang senantiasa harus ditegakkan

3. Jenis-jenis kepatuhan terhadap hukum

Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan umat manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainnya, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan mematuhi serta peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat. Dalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi dan berakibat hukum, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial mana kala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung bersifat memaksa.

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis :¹⁴

¹³ Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers. 1993), Hal. 112.

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

Dengan kata lain, mengetahui adanya tiga jenis ketaatan diatas, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan atau undang-undang sebagai bukti efektifnya suatu aturan atau perundang-undangan, paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas keefektifan suatu aturan atau perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, berarti kualitas keefektifan aturan atau perundang-undangan itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan dan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu.¹⁵ Kewajiban moral masyarakat untuk mentaati hukum, kewajiban tersebut meskipun memaksa namun

¹⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang* (Jakarta: Legisprudence Kencana, 2009), hal. 352.

¹⁵Ibid., hal. 193.

dalam penerapan atau prakteknya kewajiban tersebut merupakan tidak absolut. Kemajemukan budaya yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat, norma-norma hidup dan tumbuh berkembang dengan pesat. Kewajiban moral dalam menyelesaikan masalah-masalah dengan keadaan tertentu.

4. Ketaatan Hukum dalam Perspektif Islam

Kemudian ketaatan dari sudut pandang ajaran agama dapat dikemukakan dalam surat an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulilamri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama(bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹⁶

Ayat tersebut di atas, menggambarkan tentang pentingnya ketaatan dalam segala hal, yang memberi larangan terjadinya perbedaan pendapat yang mengakibatkan saling benturan kepentingan yang berakibat pada ketidak adilan dalam penegakan hukum. Kewajiban moral masyarakat untuk mentaati hukum, kewajiban tersebut meski pun memaksa namun dalam

¹⁶Departemen agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, (Surabaya: JayaSakti, 1997), hal. 167.

penerapan atau praktiknya kewajiban tersebut merupakan tidak absolut. Kemajemukan budaya yang tumbuh di dalam masyarakat, norma-norma hidup dan tumbuh berkembang dengan pesat. Kewajiban moral dalam menyelesaikan masalah-masalah dengan keadaan tertentu.

B. Pengangkatan Anak dan Anak Angkat

1. Anak Angkat

Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.¹⁷

Dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.¹⁸ Menurut Ensiklopedia Umum, anak angkat adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak : Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

¹⁷Undang-Undang, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hal. 67.

¹⁸Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 32.

Menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang Adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.¹⁹ Sedangkan menurut Surojo Wignodipuro, anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orangtua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandung sendiri.²⁰

Menurut Muderis Zaini, anak angkat adalah penyatuan seseorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.²¹

Menurut M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata, anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orangtua angkatnya. Ditambahkan bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri.²²

Beberapa definisi serta batasan dari beberapa para sarjana yang telah disebut diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa anak angkat

¹⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 20.

²⁰SurojoWignodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Kinta, 1972), hal. 14.

²¹Munderis Zein, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 85.

²²M.Djojodiguno dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Semarang: Bumi Aksara, 1990), hal.34.

adalah upaya mengalihkan hak serta kewajiban anak yang bukan asli dari keturunannya untuk dimasukkan kedalam satu keluarga, sehingga hak dan kewajiban si anak menjadi beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak selayaknya anak kandung.

2. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang membawa akibat hukum. Dimana seorang yang mengalihkan anak dari lingkungan kekuasaan orangtua atau walinya yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya (pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)

Sedangkan menurut hukum adat pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri dengan sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak tersebut dan anak yang dipungut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti ada antara orang tua kandung dengan anak kandungnya sendiri.²³

Dari segi etimologi yaitu asal usul kata pengangkatan anak berasal dari bahasa Belanda “Adoptie” atau adoption (bahasa Inggris) yang berarti pengangkat anak. Dalam bahasa arab disebut “*Tabanni*” yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambilan anak

²³Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hal. 117.

angkat”, sedang menurut kamus Munjid diartikan “menjadikannya sebagai anak”. Selanjutnya pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri.²⁴

Di dalam Ensiklopedia umum disebutkan pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya pengangkatan anak diadakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak/tidak mempunyai anak. Akibat dari pengangkatan yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

Mengenai definisi pengangkatan anak, terdapat beberapa sarjana yang telah memberikan pendapatnya, diantaranya adalah Surojo Wigjodiporo, menurut beliau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkatan dan anak yang dipungut/diangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orangtua dan anak kandungnya sendiri.²⁵

²⁴Mundaris Zain, *Adopsi Suatu Tinjauan* ,...., hal. 4.

²⁵Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1980), hal.123.

Menurut Soerjono Soekanto pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.²⁶ Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri dan mendapatkan hak selayaknya anak kandungnya sendiri.

Secara legal, mengangkat anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri maupun pengadilan agama. Pengangkatan anak secara legal mempunyai akibat hukum yang luas, antara lain menyangkut perwalian dan pewarisan. Sejak keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat akan menjadi wali bagi anak angkat, dan sejak saat itu, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, bila dia akan menikah, maka yang menjadi wali nikah hanyalah orang tua kandung atau saudara sedarah.

Pengangkatan anak juga dapat dilakukan secara illegal, artinya mengangkat anak yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung anak yang diangkat. Mengangkat anak secara ilegal inilah yang disinyalir sebagai celah untuk kasus jual beli anak (trafficking).

²⁶ *Ibid.*, hal. 52.

Akibat hukum dari pengangkatan anak secara ilegal adalah anak angkat tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya, dan dijadikan anak yang lahir karena perkawinan orang tua angkat. Akibatnya, seorang anak akan terputus hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran. Oleh karena itu, secara otomatis hak dan kewajiban seorang anak angkat sama dengan anak kandung harus merawat dan menghormati orang tua, layaknya orang tua kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat.

C. Regulasi Pengangkatan Anak

Regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu, jika diterjemahkan dalam kamus istilah hukum “regulasi” berarti pengaturan, penetapan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan undang-undang.²⁷ Regulasi pengangkatan anak disini dapat diartikan suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai tatacara aturan tentang pengangkatan anak dan yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Perkembangan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat pendukungnya. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis dan bersifat dinamis yang senantiasa dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Jika hukum adat yang mengatur sesuatu bidang kehidupan dipandang tidak sesuai lagi

²⁷<https://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/regulasi> di akses pada tanggal 15 januari 2019

dengan kebutuhan masyarakat setempat maka masyarakatnya sendiri yang akan merubah hukum adat tersebut agar dapat memberi manfaat untuk mengatur kehidupan mereka.

Hukum adat mempunyai corak yaitu:

- a. Hukum adat mengandung sifat tradisionil, bahwa peraturan hukum adat umumnya oleh rakyat dianggap berasal dari nenek moyang yang legendaries (hanya ditemui dari cerita orang tua)
- b. Hukum adat dapat berubah, perubahan dilakukan bukan dengan menghapuskan dan mengganti peraturan-peraturan dengan isinya secara tiba-tiba, karena tindakan tersebut akan bertentangan dengan sifat adat istiadat. Peraturan hukum adat harus dipakai dan dikenakan oleh pemangku adat (terutama oleh kepala-kepala adat), peristiwa-peristiwa yang ada sering dengan tidak diketahui berakibat perubahan peraturan adat. Terkadang masyarakat masih menyangka bahwa peraturan-peraturan lama tetap berlaku bagi keadaan-keadaan baru.
- c. Kesanggupan hukum adat menyesuaikan diri, karena di dalam hukum adat terdapat sifat hukum tidak tertulis dan tidak dikodifikasi maka hukum adat masyarakat modern ada yang melepaskan diri dari ikatan-ikatan tradisi tetapi ada juga sebagian yang masih menerapkan tradisi-tradisi tersebut

Mustofa Sy dalam bukunya mengutip F.D.Hollemanada 4(empat) sifat umum hukum adat Indonesia yang dipandang sebagai kesatuan, yaitu religius magis, komun, kontan, dan konkret. Pengangkatan anak secara adat

dilakukan dengan tata cara yang bervariasi bagi setiap daerah. Mustofa Sy dalam bukunya mengutip Bushar Muhammad, secara umum tata cara itu dilakukan secara terang dan tunai. Yang dimaksud dengan terang adalah suatu prinsip legalitas yang berarti perbuatan itu diumumkan dan dilakukan di hadapan banyak orang dengan tujuan agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Sedangkan yang dimaksud dengan tunai merupakan perbuatan itu akan selesai saat itu juga dan tidak mungkin ditarik kembali.²⁸

Hukum adat mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berasal dari nenek moyang dan berlaku secara turun temurun. Hukum adat mengatur tentang masalah perkawinan, anak, harta perkawinan, warisan, tanah dan lain-lain yang selalu dipatuhi oleh setiap masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya hukum adat sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat yang di dalamnya juga mengatur tentang pengangkatan anak. Pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat setempat namun masih perlunya pengesahan dengan suatu penetapan pengadilan .

Kedudukan anak angkat dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau keturunan yang mempunyai tiga sistem adalah sebagai berikut:

- a. Sistem Patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak, kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari

²⁸Musthofa, SY, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 50.

pada kedudukan perempuan. Contoh beberapa daerah dalam pengangkat anak menganut sistem patrilineal adalah sebagai berikut :

1) Adat Batak (Tapanuli Utara)

Apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka ia dapat mengangkat seorang anak laki-laki yang disebut “*anak naniain*”. Anak *naniain* baru sah jika memenuhi syarat-syarat adalah sebagai berikut : yang mau meng-*ainain* tidak mempunyai anak laki-laki, Anak yang diangkat tersebut harus dari antara saudara anak-anaknya atau keluarga dekat lainnya, harus *dirajahon*, artinya harus diadakan upacara adat yang telah ditentukan untuk itu dan dihadiri oleh keluarga dekat/dalih annatolu serta pengetua-pengetua dari kampung sekelilingnya (raja-rajablus).²⁹

Adanya perbedaan antara anak angkat dan anak *naniain*, apabila terjadi pengangkatan tanpa memenuhi syarat-syarat seperti mengambil anak *naniaian*, pengangkatan anak tersebut tidak diakui. Anak *naniain* menjadi ahli waris dari seorang ayah yang meng-*ain*-nya dan kehilangan hak ahli warisnya dari orang tua kandungnya . Sedangkan anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.³⁰

Pengangkatan anak secara umum yang bersifat nonformal yang tidak mempunyai akibat hukum, contoh di daerah Tapanuli Utara dikenal juga dengan memberi marga untuk si istri atau suami melalui

²⁹Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 70.

³⁰*Ibid.*,

suatu upacara adat yang harus dihadiri keluarga dekat/*dalihon natolu* dan pengetua-pengetua dari sekeliling kampung. Namun hal ini hanya terbatas bagi mereka yang mengakuinya dan tidak dapat dipaksakan agar orang-orang lain mau mengakuinya.³¹

2) Adat Batak Karo

Hukum adat Batak Karo seorang anak angkat laki-laki sepenuhnya mempunyai kedudukan dan hak mewarisi atas harta benda peninggalan orang tua angkatnya. Namun agar seorang anak dianggap sah oleh kerabat dan masyarakat adat sebagai anak angkat, maka haruslah melalui tata cara dan ketentuan peradatan dengan adanya perpindahan hukum status anak dan pengukuhanannya dalam keluarga baru yang mengangkatnya. Adapun tata cara dan ketentuan peradatan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a) Upacara pengangkatan harus dilakukan dalam suatu *Runggun Adat sangkep sitelu* (di hadapan anak *beru*, *senina*, dan *kalimbumbu*) dan pengangkatan harus mendapat persetujuan dari mereka. Dalam adat keturunan anak laki-laki dan anak perempuan sangat diharapkan keluarga karena anak laki-laki diharapkan menyambung tali kekeluargaan dengan Kalimbubu, setelah besar diharapkan anak itu kelak dapat mengawini putri Kalimbubu (pamannya). Sementara anak perempuan diharapkan dapat meneruskan tali kekeluargaan dengan anak Beru, kelak nantinya

³¹*Ibid.*,

dapat melangsungkan perkawinan dengan putra dari anak Beru. Dengan melangsungkan perkawinan maka strata sosial sembuyak, anak beru, Kalimbubu (*tribal collibium*) pada masyarakat suku Karo tetap terpelihara. Hukum Adat melihat prinsip-prinsip hukum Islam yang dikembangkan sebagai hukum, jika ada praktik adat yang menyimpang akan diluruskan secara bertahap melalui pembentukan hukum yang Islami.³²

- b) Dalam upacara adat, pengangkatan harus ada jamuan makan yang disebut *perkahkah bohan*, yaitu suatu pesta jamuan makan yang lauk-pauknya terdiri atas sayur-sayuran bercampur daging yang dimasak dalam bamboo muda (*bohan* bambu muda bekas tempat memasak). Selesai upacara jamuan makan, dua buah bambu muda bekas tempat masakan tadi dipukulkan keras-keras agar bunyinya yang nyaring didengar khalayak ramai atau para hadirin dalam perjamuan makan tersebut
- c) Pemukulan bambu tersebut disebut dengan "*perkahkah bohan*" atau diumumkannya tentang adanya pengangkatan anak. Dan yang meng-kahkah-kan bohan itu harus anak beru, pada saat itu diumumkanlah pengangkatan dan resmilah anak tadi menjadi anak si pengangkat dengan jalan memberi marga ayah angkat kepadasi anak.

³²Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja grafindo, 2008), hal. 46.

- d) Setelah pengumuman pemberian marga yang diikuti pengakuan *bebere* (kemenakan) dari pihak saudara laki-laki ibu angkat, dengan serentak pula pihak kalimbumbu menyerahkan kain perembah (semacam kain selendang) sebagai simbolik penggendong anak yang diresmikan. Kemudian pula puang kalimbumbu menyerahkan kain *ndawa* (semacam kain ulosselimut sebagai simbolik perlindungan kepada anak).
- e) Kepada pihak anak beru diberikan sekadar uang atau barang oleh pihak pengangkat anak sebagai permintaan agar anak beru menjaga anak tadi supaya tumbuh menjadi sehat dan besar. Demikian juga kepada kepala kampung diberikan sejumlah uang oleh ayah angkat sebagai pemberitahuan bahwa anak itua dalah anggota keluarga yang sah dari ayah angkat.³³

Setelah selesai upacara adat maka anak angkat telah resmi menjadi anak ah dari kedua orang tua dan dengan sendirinya ia menjadi ahli waris yang sah terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, putus hubungan hukum kekeluargaan anak dengan orang tua kandung dan tidak mempunyai kedudukan hukum lagi sebagai ahli waris terhadap pusaka orang tua kandung. Anak yang diangkat mempunyai batas umur yaitu *opedenga i tandaina nande bapana* artinya anak itu belum lagi mengenal siapa ibu bapaknya,

³³*Ibid.*, hal. 72.

usia anak tersebut dalam batas- batas usia bayi yang berumur sampai dua tahun.³⁴

Yang sah untuk melakukan pengangkatan anak ini hanyalah orang-orang yang sudah berkeluarga. Hukum adat karo tidak mengenal pengangkatan anak oleh seseorang yang belum kawin dan pengangkatan anak harus dilakukan oleh suami istri. Orang yang sudah kawin, tetapi sedang dalam perceraian tidak sah melakukan pengangkatan anak.³⁵

- b. Sistem Matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ini, kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan laki-laki.

Sistem kekerabatan matrilineal masih tetap dianut masyarakat Minangkabau. Susunan kekeluargaan Minangkabau mengalami perubahan dikenal dengan sistem keluarga kecil yang mirip keluarga batih (*nuclear family*). Merupakan keluarga terkecil "*semende*" yang terdiri atas ibu dan anak-anaknya tidak lagi secara mutlak dipimpin oleh mamak rumah (saudara kandung laki-laki dari ibu, syarat utama menjadi mamak, yaitu yang tertua, baik umur maupun derajat dalam kaum dan *jurai* yang bersangkutan), tetapi telah banyak yang dipimpin oleh ayah atau ibu.³⁶

Dalam hukum adat di Minang Kabau tidak mengenal pengangkatan anak, yang dikenal hanya dengan sebutan pengambilan

³⁴Lulik Djatikumoro, *Hukum*,....., hal. 70.

³⁵*Ibid.*,

³⁶*Ibid.*, hal. 76.

anak untuk dipelihara dan diasuh seperti anak sendiri. Anak yang diangkat masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang tua yang memelihara. Sedangkan hubungan antara anak dan orang tua kandung tidak terputus. Dalam hal ini pengangkatan anak sesuai dengan hukum adat namun perbuatan tersebut tidak menimbulkan hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkat.³⁷

- c. Parental atau Bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi yaitu bapak dan ibu, kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.³⁸

beberapa contoh daerah yang dalam pengangkatan anak menganut sistem parental atau bilateral adalah sebagai berikut:

- 1) Adat Jawa dapat diketahui pengangkatan anak angkat adalah anak *pupon*. Pengangkatan anak biasanya pihak yang akan mengangkat anak mengadakan musyawarah dengan pihak yang memiliki anak. Setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua kandungnya, kemudian diadakan upacara adat/selamatan yang disaksikan oleh kerabat-kerabat dan tetangga. Umur anak yang diangkat tidak ditentukan namun sebaiknya masih bayi. Disamping dikenal anak angkat (*pupon*), dikenal juga kebiasaan seseorang yang sudah mempunyai anak kandung mengangkat anak yang disebut anak

³⁷Munderis Zein, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 62.

³⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 23.

pungut. Anak pupon dan anak pungut itu sama saja dengan anak angkat, yang berbeda hanyalah sebutannya saja.

2) Di Sulawesi Anak angkat disebut dengan *lai poana*. Namun dalam pengangkatan tersebut tidak ada upacara khusus untuk mengangkat anak. Pada umumnya mereka diangkat anak oleh famili atau orang luar berdasarkan hubungan batin di antara yang mengangkat anak dan yang diangkat anak. Tidak ada batas umur anak angkat dan tidak ada batas berapa banyak anak yang diangkat.³⁹

3) Di Jawa Timur terdapat suatu lembaga yang menyatakan pengangkatan anak itu suatu perbuatan tunai, yaitu dengan pembayaran mata uang (*magis*) sejumlah *rong wang segobang* (17½sen) kepada orang tua kandung sebagai sarana magis untuk memutuskan ikatan anak dengan orang tuanya (*pedot*).⁴⁰

Pada umumnya pengangkatan anak dilaksanakan menurut adat kebiasaan suatu daerah dalam satu lingkungan keluarga/kerabat tertentu. Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak menurut adat dilakukan dalam satu masyarakat adat, yang masih dianut oleh komunitas adat tersebut
- b. Pelaksanaan pengangkatan anak disahkan tokoh adat setempat
- c. Pengangkatan anak menurut hukum adat, tidak disahkan ke Pengadilan Negeri namun dicatatkan ke Dinas Sosial, dan Instansi Catatan Sipil Kabupaten/kota.

³⁹Lulik Djatikumoro, *Hukum, ...*, hal. 78.

⁴⁰R. Soetjoprawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Airlangga University Press, 2002), hal. 109.

d. Pengangkatan anak tersebut juga dapat dimohonkan pengesahannya ke Pengadilan.⁴¹

Biasanya dalam pengangkatan anak ini diadakan upacara pengangkatan dengan kenduri di rumah orang tua angkat dan dengan tata cara persyaratan adat tertentu yang dihadiri oleh para keluarga dan pengetua-pengetua adat serta penguasa setempat. Beberapa macam nama anak angkat tersebut di atas mengenai hubungan kekeluargaan antara anak angkat dan orang tua kandungnya tidak putus sama sekali.⁴² Pengangkatan terkadang dilakukan secara tertulis maupun ada yang tidak tertulis, asalkan pengangkatan yang dilakukan ini dinyatakan di depan umum.⁴³ Kedudukan dan akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan secara hukum adat

berbeda tiap daerah, di mana sistem keluarga berdasarkan keturunan dari pihak laki-laki. Akibat-akibat dilakukan adopsi yaitu:

- a. Anak yang di adopsi memperoleh kedudukan sebagai anak sah dari orang tua *adoptif*
- b. Karena adopsi tersebut, maka putuslah hubungan kekeluargaan yang telah ada antara anak tersebut dengan sanak keluarga sedarah dan semendanya.⁴⁴ Perbuatan hukum tersebut melepaskan anak angkat dari pertalian keluarga dengan orang tua kandung dengan memasukkan anak

⁴¹*Ibid.*, hal. 116.

⁴²Lulik Djatikumoro, *Hukum*, ..., hal. 80.

⁴³MustofaSy, *Pengangkatan*, ..., hal. 30.

⁴⁴Prawirohamidjojo, *Pluralisme*, ..., hal. 115

angkat ke dalam keluarga pihak bapak, sehingga anak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapaknya.⁴⁵

Pengangkatan anak didalam masyarakat cukup dilakukan secara terang dan tunai.⁴⁶ Masyarakat hanya melihat secara terang dan tunai apakah anak tersebut diperlakukan secara baik selayaknya anak kandung atau tidak. Menurut hukum adat setelah upacara pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan upacara dan adat setempat, maka anak tersebut sudah dianggap sah menjadi anak angkat. Walaupun tak jarang dalam praktiknya kadang-kadang dimintakan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Umumnya di Indonesia, motivasi pengangkatan anak menurut hukum adat ada 14 macam, antara lain :

- a. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang bersifat umum karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak, di mana dengan pengangkatan anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan kelengkapan serta menyemarakkan rumah tangga;
- b. Karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut, di sebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang sangat positif, karena di samping membantu si anak juga membantu beban orang tua kandung si anak asal didasari oleh kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung;

⁴⁵R.Soepomo, *Bab-bab Hukum Adat*, (Jakarta: PustakaRakyat, 1977), hal. 118.

⁴⁶Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hal. 9.

- c. Karena belaskasihan di mana anak tersebut tidak mempunyai orang tua.
Hal ini memang suatu kewajiban moral bagi yang mampu, di samping sebagai misi kemanusiaan;
- d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah juga merupakan motivasi yang logis karena umumnya orang ingin mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki;
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak, untuk dapat mempunyai anak kandung. Motivasi ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang ada pada sementara anggota masyarakat;
- f. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua angkatnya mempunyai banyak kekayaan;
- g. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. Motivasi ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
- h. Karena faktor kekayaan. Dalam hal ini, di samping motivasi sebagai pemancing untuk dapat mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat baik bagi orang tua angkat maupun dari anak yang diangkat demi untuk bertambah baik kehidupannya;
- i. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan;

- j. Adanya hubungan keluarga, maka orang tua kandung dari si anak tersebut meminta suatu keluarga supaya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan;
- k. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat;
- l. Ada perasaan kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus. Pengertian tidak terurus, dapat saja berarti orang tuanya hidup namun tidak mampu atau tidak bertanggung jawab, sehingga anaknya menjadi terkatung-katung. Di samping itu, juga dapat dilakukan terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia;
- m. Untuk mempererat hubungan keluarga, di sini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat;
- n. Karena anak kandung sakit-sakitan atau selalu meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan si anak, diberikannya anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak, dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. Dari motivasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat kita.⁴⁷

Terdapat banyak metode pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia. Setiap daerah yang memiliki ciri khas berbeda dan unik yang

⁴⁷Zaini Mudaris, *Adopsi Suatu Tinjauan*,..., hal.61.

membuat pengangkatan anak dalam kehidupan masyarakat adat sangat menarik. Berikut beberapa contoh tentang pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, antara lain:

- a. Di Jawa dan Sulawesi adopsi jarang dilakukan dengan sepengetahuan kepala desa. Mereka mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan. Lazimnya mengangkat anak keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran uang atau penyerahan barang kepada orang tua si anak. Anak angkat masih tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan keluarganya, dan ia pun berhak pula sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi hanya terbatas pada harta peninggalan selain barang-barang pusaka yang berasal dari warisan yang harus dikembalikan kepada kerabat suami atau kerabat isteri.⁴⁸
- b. Di Bali, sebutan pengangkatan anak disebut “nyentanayang”. Anak lazimnya diambil dari salah satu clan yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang disebut purusa (pancer laki-laki). Tetapi akhir-akhir ini dapat pula diambil dari keluarga istri (pradana).
- c. Dalam masyarakat Nias, Lampung dan Kalimantan. Pertama-tama anak harus dilepaskan dari lingkungan lama dengan serentak diberi imbalannya, penggantinya, yaitu berupa benda magis, setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung anak yang dipungut itu masuk ke dalam kerabat yang memungutnya, itulah perbuatan ambil anak

⁴⁸Ahmad Syafii, “Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hunafa* Vol. 4, No.1, Maret 2007: 49 – 62.

sebagai suatu perbuatan tunai. Pengangkatan anak itu dilaksanakan dengan suatu upacara-upacara dengan bantuan penghulu atau pemuka-pemuka masyarakat, dengan perkataan lain perbuatan itu harus terang.⁴⁹

Anak angkat dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dapat dilihat dari proses pelaksanaan pengangkatan anak tersebut. Soerdjono Soekanto dalam bukunya mengatakan secara umum di Indonesia pengangkatan anak atau adopsi menurut hukum adat dapat di bedakan dalam dua macam adopsi,yakni⁵⁰:

a. Secara Umum

- 1) Terang, pelaksanaan pengangkatan anak dengan disaksikan oleh Kepala Desa.
- 2) Tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan suatu pembayaran berupa benda-benda magis sebagai gantinya.
- 3) Terang dan tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan adanya kesaksian dan pembayaran.
- 4) Tidak terang dan tidak tunai, pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa kesaksian dan pembayaran.

b. Secara Khusus

Dapat terjadi dengan bermacam-macam hal yaitu:

- 1) Mengangkat anak tiri karena tidak mempunyai anak, hal ini terjadi di daerah Kalimantan pada suku Manyaan siang Dayak yang disebut Ngun- kupanak.

⁴⁹Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hal. 182.

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 52.

- 2) Mengangkat anak dari istri yang kurang mulia, initerjadi didaerah Bali, oleh karena itu harus dilakukan dengan mengadakan upacara besar.
- 3) Mengangkat anak perempuan supaya dapat mewaris, dalam hal ini terjadi di daerah Lampung yang mempunyai masyarakat patrilineal dan mempunyai sistem mayorat, maka hal ini terjadi dengan melakukan pengangkatan anak dengan cara *tambik anak* dan *tegaktegi*.

Anak-anak yang berhak menjadi ahli waris dapat dibedakan atas:⁵¹

- a. Anak kandung, yakni anak yang lahir dalam suatu perkawinan sehingga timbul hubungan hukum antara orang tua dan anak baik dalam pemeliharaan juga terhadap harta kekayaan. Anak kandung akan menjadi ahli waris dari orang tuanya yang meninggal dunia, akan tetapi jika di hubungkan dengan sistem kekerabatan maka tidak semua anak yang masih hidup berhak menjadi ahli waris, yaitu:
 - 1) Pada masyarakat matrilineal, semua anak berhak menjadi ahli waris hanya dari ibunya saja (misalnya di Minangkabau).
 - 2) Pada masyarakat patrilineal, hanya anak laki-laki saja yang berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya (misalnya di Batak)
 - 3) Pada masyarakat bilateral, semua anak baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya (misalnya di Jawa).

⁵¹Ter Haar.B, *Asas-Asas dan Susunan*,..., hal. 28.

b. Bukan anak kandung, yakni anak yang tidak di lahirkan dari perkawinan pewaris, yang terdiri atas:

- 1) Anak angkat, yakni anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Akan tetapi tidak semua anak angkat berhak menjadi ahli waris. Misal di Bali anak angkat berhak menjadi ahli waris orangtua angkat karena pengangkatan anak tersebut mengakibatkan terputusnya pertalian keluarga dengan orang tua sendiri. Sedangkan di Jawa pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusannya pertalian keluarga orang tuanya sendiri.
- 2) Anak piara, yakni anak orang lain yang dipelihara baik dengan suka rela atau perjanjian. Anak piara tidak berhak menjadi ahli waris yang memeliharanya.
- 3) Anak gampang, yakni anak yang dilahirkan tanpa ayah sehingga anak tersebut berhak menjadi ahli waris dari ibunya saja.
- 4) Anak tiri, yakni anak yang dibawa oleh suami atau istri kedalam suatu perkawinan yang baru. Anak tiri hanya menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya saja.

Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri saja, melainkan juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap sangat selektif.

Walaupun sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam, namun lembaga pengangkatan anak memiliki karakteristik masing-masing daerah yang mewarnai kebhinnekaan kultur suku bangsa Indonesia prosedur pengangkatan anak tidak sama untuk seluruh kepulauan Indonesia. Dibeberapa daerah seperti Lampung, Gayo dan Nias diperlukan upacara keagamaan dengan pengumuman dan penyaksian oleh khalayak ramai dan persetujuan para anggota keluarga yang bersangkutan, sedangkan di Jawa tidak diperlukan upacara keagamaan tertentu dan persetujuan anggota keluarga⁵².

Di Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dan terputus hak warisnya. Kemudian memasukkan anak itu kedalam kelaurga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan anak kandung untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.⁵³

Sedangkan di Jawa, anak angkat masih tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan keluarganya, dan ia pun berhak pula sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi hanya terbatas pada harta peninggalan selain barang-barang pusaka yang berasal dari warisan yang harus dikembalikan kepada kerabat suami atau kerabat isteri. Di Sulawesi Selatan, anak angkat masih ada hubungan waris dengan orang tua kandung dan keluarganya, dan ia tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tua angkat

⁵²Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*. (Jakarta: LP3ES, 1983), hal. 50.

⁵³R.Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*,..., hal. 99.

dan keluarganya, tetapi ia bisa diberi hibah atau wasiat.⁵⁴ Pada masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat yang berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Jika orang tua selain mempunyai anak kandung juga anak angkat, maka dalam pewarisan anak kandung akan mendapat lebih banyak dari anak angkat, dikarenakan anak angkat masih tetap dapat mewarisi dari orang tua kandungnya. Adat Jawa mengenal asas, *ngangsu sumur wong loro*, yang bermakna bahwa seorang anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat⁵⁵.

2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

a. *Staatsblad* 1917 nomor 129

Dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 pasal 5 sampai pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara yang ada dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa. *Staatsblad* 1917, Nomor 129 pasal 5 menyebutkan bahwa seorang laki-laki beristri atau pernah beristri tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam keturunan garis laki-laki karena disebabkan kelahiran maupun keturunan maka boleh mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Pengangkatan anak menurut *Staatsblad* ini hanya untuk anak laki-laki dilakukan dengan akte

⁵⁴B.TerHaar Bzn, *Beginnelsen en Stelsel van het Adat Rect* Terjemah K.Ng.Soebakti Poesponoto. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hal. 182-184.

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 117.

notaris. Ketentuan pengangkatan ini dilakukan hanya untuk anak laki-laki saja yang dianggap dapat memberikan keturunan.⁵⁶

Pengangkatan anak dapat mengakibatkan putusnya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung, kecuali:

- 1) Mengenai larangan kawin yang berdasar atas suatu tali kekeluargaan
- 2) Mengenai peraturan hukum pidana yang berdasar pada tali kekeluargaan
- 3) Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan
- 4) Mengenai pembuktian dengan seorang saksi
- 5) Mengenai bertindak sebagai saksi.⁵⁷

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah generasi penurus cita-cita bangsa dan anak-anak tersebut harus mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka untuk dapat mencetak generasi penerus yang mampu memikul tanggung jawab tersebut kesejahteraan mereka pun juga harus dipenuhi dengan baik. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, khususnya anak angkat maka dalam Undang-undang ini pun diatur secara tegas tentang pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat tersebut.

Dalam bab IV mengenai kesejahteraan anak pasal 12 mengatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat dan

⁵⁶ Muderis Zaini, *Adopsi: Suatu Tinjauan*,..., hal. 35.

⁵⁷ *Ibid.*

kebiasaan masyarakat harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik dan kesejahteraan bagi anak dan pengangkatan anak yang dilakukan dalam rangka kepentingan kesejahteraan anak yang tidak dilakukan menurut adat kebiasaan masyarakat harus dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang ini suatu upaya apapun yang dilakukan intinya untuk kepentingan terbaik bagi anak.

- c. Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. pasal 39 hanya dapat dilakukan demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, pencatatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak, calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkatnya, jika tidak diketahui asal usul anaknya maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40 mengatur bahwa “setiap orang tua angkat wajib untuk memberitahukan asal usul orang tua kandung anak kepada anak yang bersangkutan, tetapi dalam pemberitahuannya dilihat dari situasi, kondisi dan kesiapan anak. Sementara, Pasal 41 mengatur bahwa “pemerintah dan masyarakat ikut serta dalam bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1989 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

Dalam Surat edaran tersebut, menyebutkan syarat-syarat pengangkatan anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di pengadilan dan lain-lain.

Prosedur untuk mendapatkan mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur :

- 1) Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi *voluntarie (jurisdiction voluntaria)*;
- 2) *Petitum* Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam *petitum* permohonan;
- 3) Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga

Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (*inter-country-adoption*) pengadilan akan menerbitkan ”putusan” Pengesahan Pengangkatan Anak.⁵⁸

Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1) Syarat-syarat bagi orang tua angkat:

- a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat dibolehkan.
- b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terkait dalam perkawinan sah atau belum menikah di bolehkan.

2). Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat:

- a) Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan. Surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
- b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang di maksud diatas harus pula mempunyai ijin tertulis dari mMenteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat. ⁵⁹

⁵⁸ DjajaS.Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012),hal. 119.

⁵⁹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, (Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek)

- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada bagian 8 paragraf 1 pasal 47 pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon, pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang berwenang menerbitkan kutipan akta kelahiran atau Dinas Catatan Sipil paling lambat 30 hari setelah mendapat salinan penetapan pengadilan, setelah dilaporkan kepada pejabat catatan sipil maka selanjutnya pejabat berwenang membuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.⁶⁰
- f. Selanjutnya secara teknis telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang memberi jaminan masa depan yang baik kepada anak angkat.

Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia terdapat dua macam:

- 1). Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat;
- 2). Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Pengangkatan anak berdasarkan undang-undang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui

⁶⁰Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, diakses dalam http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_23.pdf pdf diakses pada 15 januari 2019

lembaga pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang undangan dan berdasarkan penetapan pengadilan.⁶¹

Pengaturan mengenai prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut:

- 1) Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan :
 - a) Surat penyerahan anak dari orang tua /wali kepada instansi sosial
 - b) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab /Kota kepada Organisasi Sosial
 - c) Surat penyerahan anak dari organisasi sosial kepada calon orang tua angkat
 - d) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat
 - e) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat
 - f) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat
 - g) Surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah
 - h) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater

⁶¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, diakses dalam [https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/PP NO 54 2007. pdf](https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/PP%20NO%2054%202007.pdf) diakses pada 15 januari 2019

- i) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- 2) Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup
 - b) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri)
 - c) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
 - d) Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orangtua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal)
 - e) Proses Penelitian Kelayakan
 - f) Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah
 - g) Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke

Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat.

h) Penetapan Pengadilan

i) Penyerahan surat penetapan pengadilan.⁶²

3. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Pengertian anak dalam Islam berbeda dengan pengertian anak dilihat dari ilmu hukum, anak dalam Islam merupakan makhluk ciptaan Allah SWT. yang mulia mempunyai unsur-unsur ilmiah. Hak dan kewajiban anak kandung maupun orang tua dan sebagai ibu yang sudah melahirkan seorang anak yang tidak pernah mungkin bisa diingkari. Menurut hukum Islam, anak perempuan pada saat akan menikah memerlukan kehadiran ayah kandung sebagai wali.

Di dalam hukum islam diperkenankan melakukan pengangkatan anak sepanjang tidak memposisikan anak angkat sebagai anak kandung dan tidak menghilangkan nasab dari orangtua kandungnya. Hal tersebut berdasarkan dengan Al-Qur'an dalam surah Al- Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya:

"...dan ia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri yang demikian itu hanyalah perkataan di mulut saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula (pengabdian) kamu.

⁶²Dessy balaati. "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia" *lex privatum*, vol.1/no.1/jan-mar/2013 hal.146.

Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁶³

Sebab turunnya ayat tersebut dikarenakan dari sebuah kisah yaitu ketika Rasulullah saw, mempunyai anak angkat Zaid bin Haritsah, suatu ketika ayah Zaid datang ke Makkah dan meminta kepada beliau agar menjual Zaid kepadanya atau memerdekakannya. Maka Rasulullah SAW pun berkata, “Dia bebas dan boleh pergi kemana dia suka”. Tetapi Zaid tidak mau berpisah dari Rasulullah SAW. Itu sebabnya, maka ayahnya menjadi marah dan berkata, “Wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah bahwa Zaid (sekarang) bukan anakku lagi”, dan Rasul pun menimpali dengan berkata, “saksikan pula oleh kalian bahwa dia sekarang adalah anakku.

Para ulama' fikih sepakat bahwa dalam hukum islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal dalam hukum barat / hukum skuler dan praktik sebagaimana masyarakat jahiliyah, yakni pengangkatan anak dengan menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus dengan orangtua kandungnya, anak angkat mempunyai hak waris sama dengan anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak yang diangkatnya. Hukum islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk

⁶³Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1997), hal. 865.

memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dalam hal beribadah kepada Allah SWT.⁶⁴

Hukum Islam mengenal pengangkatan anak dalam arti terbatas yakni terbatas hanya dalam pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya saja. Tidak boleh memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

Selanjutnya dalam hal seorang anak yang ditemukan, dan tidak diketahui siapa ayahnya, maka orang yang menemukan tersebut dapat meng klaim dirinya sebagai ayahnya/ orang tuanya sampai benar-benar diketahui ayah yang sebenarnya. Para ulama' fikih telah sepakat bahwa jika ada seorang anak yang identitas orang tuanya tidak diketahui dan anak tersebut ditemukanoleh seorang muslim dan diyakini bahwa anak itu adalah anaknya bukan anak orang lain dengan ciri-ciri yang ada,maka demi menjaga kehormatan dan nama baik anak itu di masyarakat dengan adanya orang tua yang jelas, maka dapat ditetapkan hubungan nasab anak tersebut dengan orang yang mengakuinya atau menemukannya dan terjadilah hubungan kemahraman dan kewarisan antara keduanya.⁶⁵

Sedangkan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam praktek pengadilan agama, berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia Inpres No I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, menetapkan bahwa anak angkat ialah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sendiri, biaya pendidikan dan

⁶⁴Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Pena Media, 2008), hal. 45.

⁶⁵*Ibid.*, hal. 48.

sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli kepada orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan.

Menurut Masbuk Zuhdi mengatakan bahwa pengangkatan anak seperti praktik dan tradisi di zaman jahiliyah, yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum dilakukan pengangkatan anak, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.⁶⁶

Islam melihat bahwa pengangkatan anak secara mutlak itu merupakan upaya pemalsuan terhadap keaslian dan kenyataan yang menjadikan orang asing dari luar keluarga, menjadi anggota keluarga yang dapat berkumpul yang dapat berbaur dengan anggota wanita dari keluarga tersebut karena anak angkat dianggap sebagai mahram, padahal dalam kenyataannya mereka tidak mempunyai hubungan darah denganya dan mereta tetaplah orang asing dalam keluarga tersebut. Hal yang demikian dapat menimbulkan kebencian dan kedengkian kepada anak angkat tersebut yang merampas hak warisnya. Dari fakta sosiologis tersebut bahwa anak angkat yang disejajarkan dengan anak kandung dapat menimbulkan kedengkian, fitnah, menimbulkan rasa permusuhan dan memutuskan hubungan persaudaraan. Oleh karena itu Al Qur'an menghapus dan membatalkan pengangkatan anak dengan system

⁶⁶Nasroen Haron dkk, *Ensiklopedi hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 192.

jahiliyah yang ditiru oleh hukum sekuler, dengan mengharamkannya serta membatalkan semua akibat hukum dari pengangkatan anak dengan cara jahiliyah atau sekuler.⁶⁷

Dalam melakukan pengangkatan anak seseorang dilarang mengingkari nasab anak- anaknya sendiri, maka ia sendiri tidak boleh mengakui anak dari orang lain sebagai nasabnya. Islam dalam hal pengangkatan anak yang secara mutlak merupakan pemalsuan nasab (keturunan). Pemutusan nasab yang disengaja, baik dilakukan oleh orang tua angkat, pihak keluarga orang tua angkat, orang tua kandung, pihak keluarga orang tua kandung, maupun oleh si anak yang telah dewasa dan cakap berpikir merupakan perbuatan yang dilarang. Penggaburan nasab asal usul si anak angkat dalam waktu kedepan konsekuensi yang serius terutama dalam hukum perkawinan.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam mempunyai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak terhadap anak terlantar
- b) Pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan anak sebagai mana diatur dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.
- c) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antar anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya.

⁶⁷Yusuf Qordawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar, 2004), hal. 285.

- d) Jika anak angkat tersebut perempuan maka yang menjadi wali nikah tetap ayah kandungnya, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila ternyata ia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 menikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.⁶⁸
- e) Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kemaslahatan dan pendidikan anak tersebut.
- f) Anak angkat yang tidak menerima wasiat, tetapi dapat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
- g) Untuk melakukan pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang/badan yang menguasai anak yang akan diangkat, dengan calon orang tua angkat.
- h) Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak.
- i) Pengangkatan anak bagi yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, berdasarkan Fatwa Majelis

⁶⁸Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hal. 186.

Ulama Indonesia Nomor:U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402H/10 Juni 1982.

- j) Demi kepastian hukum, pengangkatan anak menurut hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa orang yang dihubungkan nasab kepadanya membenarkan bahwa ia betul mempunyai hubungan nasab dengan seseorang yang dihubungkan nasab kepadanya.

Ada saksi-saksi yang membenarkan pengakuan dari orang yang dihubungkan nasab kepadanya dan saksi-saksi ini diperlukan jika orang lain yang dihubungkan dengan nasab kepadanya tidak membenarkan pengakuan tersebut.⁶⁹ Pengangkatan anak menurut hukum Islam mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologis dan keluarga.
- b) Beralihnya tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat mengenai biaya hidup sehari-hari, pendidikan dan kasih sayang.
- c) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

⁶⁹*Ibid.*

- d) Anak angkat tidak dapat mempergunakan nama orang tua angkat secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat
- e) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkat.⁷⁰
- f) Untuk melindungi hak-hak orang tua angkat dan anak angkat harus adanya kepastian hukum mengenai adanya wasiat wajibah.⁷¹

4. Akibat hukum pengangkatan anak

a) Hubungan hukum dengan orang tua kandung

Menurut peraturan perundangan, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.⁷² Sedangkan menurut hukum adat (sebagian). Pengangkatan anak memutus hubungan anak yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya.⁷³

b) Perwalian

Dalam hal perwalian sejak adanya putusan atau penetapan pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.⁷⁴ Dalam hal perwalian orang tua angkat hanya mempunyai hak

⁷⁰Pagar, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan (Suatu Atas Pembaharuan Hukum Islam Indonesia)", *Mimbar Hukum*. No.54 Thn XII, Jakarta, 2001

⁷¹Alam dan Fauzan, *Hukum*,..., hal. 48.

⁷² Undang-Undang Perlindungan Anak , Nomor 23 Tahun 2002. (Pasal 39 butir 2)

⁷³ Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hal. 34.

⁷⁴ *Ibid.*

pengasuh anak yang bertanggung jawab atas biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya.⁷⁵

c) Dalam kewarisan.

Menurut ulama fiqih, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yakni karena hubungan kekerabatan atau seketurunan (*al-qarabah*), karena perkawinan yang sah (*al-musaharah*), dan karena hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong-menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya.⁷⁶

Anak angkat tidak termasuk dalam tiga faktor di atas, dalam arti anak angkat bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu anak angkat tidak memiliki hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat 1 disebutkan bahwa ahli waris terdiri dari:

a) Menurut hubungan darah

- (1) Golongan laki laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Otje Salman S , *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT.Rafika Aditama, 2002), hal. 49.

- (2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: janda atau duda
- c) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak termasuk kedalam golongan ahli waris. Namun dalam islam anak angkat bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya namun bukan dengan cara waris melainkan dengan cara hibah atau wasiat yang dalam hal ini lebih ditekankan dengan istilah wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya halangan *syara'*.⁷⁷

Namun karena hubungan keduanya sudah akrab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri, maka Islam tidak menutup sama sekali anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Caranya dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh orang tua angkatnya sebelum meninggal dunia. Ketentuan wasiat dalam hukum Islam adalah paling banyak sepertiga dari harta warisan QS.al-ma'idah ayat 106 yang artinya sebagai berikut:

⁷⁷ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Pena, 2008), hal. 79.

*“Wahai orang-orang yang beriman apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaknya (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu....”*⁷⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terdapat hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak -banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak -banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.⁷⁹

Berbeda dengan hukum Islam menurut hukum adat danurisprudensi Mahkamah Agung, kedudukan anak angkat sama seperti seorang anak kandung. Anak angkat mewarisi harta orang tua angkatnya, kecuali terhadap harta pusaka. Harta pusaka kembali kepada ahli waris keturunan darah.⁸⁰

d) Dalam perkawinan.

Dalam Islam telah diatur siapa saja yang dilarang kawin satu samalainnya. Berdasarkan al Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 yang artinya:

⁷⁸Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, (Surabaya: JayaSakti, 1997), hal. 242.

⁷⁹ Undang-undang, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016) hal. 77.

⁸⁰ Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hal. 35.

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*⁸¹

Larangan kawin dalam ayat ini hanya berlaku bagi yang berhubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus keatas dan kebawah sertagaris menyamping, termasuk mertua, menantu, dan anak tiri yang ibunya telah digauli oleh ayah tirinya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu larangan diatas, sebab ia berada diluar kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, secara timbal balik antara dirinya dengan keluarga orang tua angkatnya boleh saling mengawini dan orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, kecuali kalau diwakilkan kepadanya oleh orang tua kandungnya.⁸²

Selanjutnya, pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak masuk dalam salah satu unsur kemahraman itu, seperti haram saling mengawini dan sebagainya, sehingga antara kedua belah

⁸¹Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, (Surabaya: JayaSakti, 1997), hal 156.

⁸²Ahmad Syafi'i, "Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam". *Jurnal hunava* vol. 4, No.1, maret 2007.

pihak tidak ada larangan saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi.⁸³

C. Penelitian Terdahulu

Pada sub bab penelitian terdahulu akan memberikan telaah pustaka atau penelitian sejenis yang telah dilakukan peneliti lain sebelumnya yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini yang berjudul “Ketaatan Masyarakat Kabupaten Trenggalek Terhadap Regulasi Pengangkatan Anak”. Namun demikian meskipun terdapat kemiripan namun dapat dipastikan bahwa tidak ada penelitian lain yang sejenis dan sama persis dengan penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Novi Kartikaningrum untuk Tesis S2 di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008 dengan judul “Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi di Semarang dan Surakarta)”. Pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan-hambatan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dalam perspektif perlindungan anak, serta prospek pelaksanaan adopsi anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak.

Kesimpulan dalam penelitian Novi Kartikaningrum menyatakan bahwa prosedur pelaksanaan adopsi anak oleh orang tua adopsi adalah pelaksanaan adopsi anak terbagi menjadi 4 (empat) tahap yaitu tahap permintaan izin pengangkatan anak, tahap laporan sosial izin pengasuhan anak, tahap pengesahan izin pengkatan anak di Pengadilan Negeri, dan tahap

⁸³Ibid,

pemberitahuan tentang izin pengangkatan anak kepada pihak-pihak yang terkait. Sedangkan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi proses pelaksanaan adopsi anak adalah keharusan dalam persamaan agama antara calon orang tua adopsi dan calon anak adopsi dan prospek pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan anak serta belum adanya ketentuan hukum yang mengatur masalah adopsi anak. Prospek pelaksanaan anak dalam perspektif perlindungan anak adalah bahwa pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses adopsi. Seharusnya, untuk ke depan dibentuk suatu lembaga pengawas untuk mengontrol jalannya adopsi anak.⁸⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Riri Silvia untuk Tesis S2 di IAIN Sumatera Utara-Medan pada tahun 2013 dengan judul “ Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Medan (Studi Perkara Tahun 2008 S/D 2010)”. Pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus pada untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan dampak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Diakhir penelitian Riri Silvia menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang telah diberlakukan terlebih dahulu. Peraturan Pemerintah ini diberlakukan agar tidak hilangnya nasab si anak angkat

⁸⁴ Novi kartikaningrum, *Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi di Semarang dan Surakarta)*, (Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2008)

terhadap orang tua kandung. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di Pengadilan Agama, terutama di Pengadilan Agama Medan dalam pengangkatan anak telah disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.⁸⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Agung Tresna Putra untuk Tesis S2 di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2007 dengan judul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten”. Pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada faktor pelaksanaan pengangkatan anak di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung dan akibat hukum pengangkatan anak dalam pewarisan di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung.

Pada akhir penelitiannya Agung menyimpulkan bahwa Pengangkatan anak di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung dilaksanakan secara terang dan tunai yaitu dilakukan menurut hukum adat dengan upacara adat besar yang disaksikan oleh tua-tua adat. Pengangkatan anak menurut hukum adat di Kabupaten Lebak terselenggara hampir selalu dalam klan keluarga besar yang erat menurut garis kekeluargaan parental, walaupun akhir-akhir ini diperbolehkan mengangkat anak diluar lingkungan itu, bahkan di beberapa kelurahan di Kecamatan Rangkas Bitung juga ada anak orang lain diambil sebagai anak.

⁸⁵ Riri Silvia, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Medan (Studi Perkara Tahun 2008 s/d 2010)*, (Tesis, Medan, IAIN Sumatra Utara 2013)

Akibat hukum pengangkatan anak di Kecamatan Rangkas Bitung, yaitu: (a) Apabila anak angkat tersebut diangkat dengan tujuan *meneruskan keturunan* dari orang tua yang mengangkatnya, maka anak angkat tersebut sebagai ahli waris dan berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya yaitu harta bersama dari kedua orang tua angkatnya. Kedudukan anak tersebut sama dengan anak kandung, mempunyai anak kandung. (b) Apabila anak angkat tersebut hanya diangkat dengan tujuan *pemeliharaan semata-mata*, maka kedudukannya tersebut bukan sebagai ahli waris, karena diangkat bukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan, sehingga ia tidak berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Ia mendapatkan bagian dari warisan tersebut bukan dalam kedudukannya sebagai ahli waris, namun telah memberikan manfaat atau keuntungan bagi orang tua angkatnya, maka kepadanya diberikan sebagian dari bagian warisan orang tua angkatnya.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Agung Tresna Putra dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengangkatan anak . perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian tersebut yaitu kecenderungan hukum yang dianut oleh sebagian besar masyarakat kabupaten trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Happy Budyana Sari untuk Tesis S2 di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2009 dengan judul “Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”. Pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada konsep pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam, dan pelaksanaan proses pengangkatan anak di Pengadilan agama

dan untuk memahami akibat hukum apa yang timbul dengan adanya pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam.

Pada akhir penelitiannya Happy Budyana Sari menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau sesrahan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).

Berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan yaitu mengenai perkawinan dan system waris. Dalam perkawinan yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris begitu juga sebaliknya, yang besarnya adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Alqur'an dan sunnah serta hasil ijtihad yang berlakudi Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan mendasar terhadap kewenangan Peradilan Agama. Salah satu perubahan itu adalah perkara pengangkatan anak termasuk kewenangan baru pengadilan agama sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 49 H

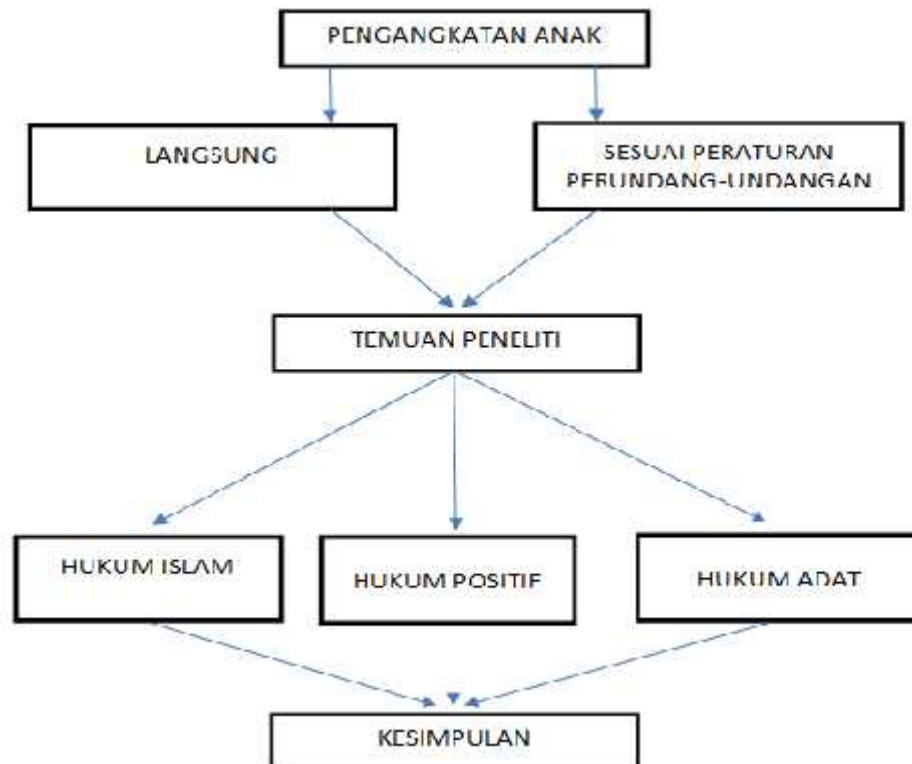
angka 20. Penegasan tersebut, di satu sisi menunjukkan adanya pengakuan dari negara terhadap eksistensi lembaga pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam. Di sisi lain pada saat yang sama menepis keragu-raguan masyarakat muslim dan para praktisi hukum Peradilan Agama untuk memanfaatkan lembaga tersebut.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Triyono Sari untuk Tesis S2 di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2006 dengan judul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Kaliwungu Pemerintah Kabupaten Semarang”. Pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dan untuk mengetahui akibat hukum bagi pengangkatan anak di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang.

Pada akhir penelitiannya Triyono menyimpulkan bahwa *pertama*, pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dilaksanakan dengan mengadakan selamatan (upacara adat), memberikan berkat kepada para tetangga dan dilakukan dihadapan RT/RW dan Kepala Desa setempat, *Kedua*, Pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dilakukan beberapa syarat-syarat diantaranya ada kesepakatan antara kedua orang tua angkat dan orang tua asal, ada pernyataan kesepakatan tertulis yang disaksikan oleh Kepala Desa dan bidan yang menolong kelahirannya. Selanjutnya diajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan anak. *Ketiga*, Akibat hukum bagi pengangkatan di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang yaitu anak

angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya sedangkan barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya, dania tetap mewarisi harta gono gini orang tua asalnya. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang karena faktor yuridis yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dengan akibat hukum dari praktik pengangkatan anak itu sendiri, faktor sosial yang menyangkut pengaruh sosial terhadap perbuatan hukum tersebut, faktor psikologis yaitu masalah reaksi kejiwaan dari anak angkat tersebut yang ditimbulkan adanya perpindahan lingkungan yang secara cepat dan sekaligus.

D. Paradigma Penelitian



Dalam penelitian ini di jabarkan bagaimana ketaatan hukum masyarakat di Kabupaten Trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak, kajian penelitian ini peneliti mengambil perspektif hukum positif yang berkaitan tentang pengangkatan anak, kemudian dalam hukum Islam peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat setempat, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui kecenderungan masyarakat di kabupaten trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak.